

PESRPEKTIF PATRONASE EDWARD ASPINAL DALAM PPROSES PEMANGAN BUSYRO KARIM SEBAGAI BUPATI DUA PERIODE DI KABUPATEN SUMENEP

Ahlul Roiyan
Universitas Airlangga Surabaya
roiyanahlur@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out about the pattern of leadership built by Busyro Karim so that he could win the regional election for two terms in Sumenep district, Madura. In addition, this research also proves that there are power relations that are formed in society, both in general and the community elites who are in government. In addition, there is also a patron-client relationship during the election process for the Regent. Based on the issues raised, researchers used the theory of patronage as a research analysis scalpel. This research is descriptive in nature which is taken from some data as material for analyzing data. The data was taken through interviews and literature review contained in the qualitative method. The results of the study found that there was a power relation that was formed in the process of selecting Bustro Karim as Regent for Two Periods, besides that there was also a patronage relationship in the process of selecting a Regent.

Keywords: Ulama and goverment, Pilkada, Power Relations, Patron-Client

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait pola kepemimpinan yang dibangun oleh Busyro Karim sehingga dapat memenangkan Pilkada dua periode di kabupaten Sumenep, Madura. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat relasi kuasa yang terbentuk pada masyarakat, baik secara umum maupun elit-elit masyarakat yang berada dalam pemerintahan. Di samping itu juga terdapat hubungan bersfiat patron-klien saat proses pemilihan Bupati berlangsung. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan teori patronase sebagai pisau bedah analisis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang diambil dari beberapa data sebagai bahan untuk menganalisis data. Data tersebut diambil melalui wawancara dan kajian Pustaka yang terdapat di dalam metode kualitatif. Hasil penelitian ditemukan adanya relasi kuasa yang terbentuk pada proses pemilihan Bustro Karim sebagai Bupati Dua

Periode, di samping itu juga terdapat hubungan patronase dalam proses pemilihan Bupati.

Kata kunci: ulama dan pemerintah, Pilkada, relasi kekuasaan, Patron-klien

Article History: *Received 22 July 2023, Revised: 15 Agust 2023, Accepted: 01 November 2023, Available online 30 December 2023*

Pendahuluan

Relasi antara ulama dan politik dalam konteks pemilihan pemimpin di Indonesia tidak dapat dihindari. Fenomena keterlibatan ulama terhadap politik hampir dapat ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Madura khususnya di daerah Sumenep, peran seorang kiai dianggap sangat sentral dalam upaya pemenangan calon politik. Masyarakat Madura khususnya masyarakat Sumenep mempunyai pra-pemahaman bahwa sosok seorang Kiai itu sakral. Bagi masyarakat Sumenep fatwa seorang kiai harus ditaati dan dipatuhi. Jadi secara tidak langsung di sini, menurut Rudi Subiyakto kiai secara fungsi selain sebagai tokoh agamawan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, juga fungsi lainnya yaitu sebagai juru pemenangan calon pemimpin (Rudi Subiyanto, 2011: 42).

Melihat sejarah pemilihan pemimpin di Indonesia belakangan ini dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga pada tingkat nasional, selalu bakal calon pemimpin selalu mengandeng tokoh-tokoh agama dalam setiap kampanye. Dilibatkannya seorang kiai dalam setiap pemilihan bakal calon pemimpin menjadi pertimbangan utama, sebab selain fatwa seorang kiai pasti di dengar, juga kiai memiliki potensi massa di setiap wilayah di mana mereka hidup (Merlia Indah Prastiwi, 2015: 201). Kiai dengan fatwa-fatwanya akan mampu mempengaruhi kesadaran pemilih untuk memilih bakal calon yang diusung.

Khusus dalam penelitian yang peneliti angkat, studi kasusnya sangat menarik. Menariknya dalam studi kasus ini yaitu objek yang diteliti selain sebagai pemimpin dua periode di

daerah Sumenep, juga pemimpin tersebut merangkap sebagai seorang pengasuh pondok pesantren di salah satu tempat di Sumenep. Jadi selain menjabat sebagai Bupati Busyro juga sekaligus menjadi pengasuh pondok pesantren di daerah Sumenep. Jadi sebab kenapa Busyro dapat menjabat selama dua periode, selain sebab kebijakan-kebijakan politiknya yang disukai masyarakat, juga beliau mempunyai relasi pondok pesantren di Sumenep sebagai modal social pemenangan. Pondok pesantren inilah kemudian menjadi anasir utama dalam melakukan kampanye.

Secara antropologi masyarakat Madura menganggap bahwa pondok pesantren merupakan tempat sakral. Di tempat tersebut masyarakat Madura berbondong-bondong menyekolahkan anaknya. Selain factor pondok pesantren, masyarakat Madura juga melihat sosok kiai yang mengasuh pondok pesantren tersebut. Bagi orang Madura sosok seorang Kiai merupakan subjek yang dianggap sakral. Oleh sebab itu bagi masyarakat Madura, tradisi pondok pesantren, santri, dan Kiai tidak dapat dipisahkan. Terlebih-lebih bagaimana orang Madura sangat menghargai subjek yang bernama Kiai. Istilah kiai memang sudah melekat di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak mengenal istilah kiai. Istilah kiai dalam kajian akademik dipopulerkan oleh Clifford Geertz sejak tahun 1960-an dalam diskursus akademik. Beliau berasal dari kebangsaan Amerika yang ahli dibidang antropologi. Dalam bukunya yang berjudul *The Religion of Java* menyinggung istilah kiai, Geerts menyebutkan bahwa kiai merupakan seseorang yang berprofesi sebagai guru di sebuah pesantren dan dia juga merupakan orang tua yang dihormati atau sebagai guru agama yang berwibawa dan mandiri. Geerts juga merupakan seseorang yang mempopulerkan istilah Santri, Abangan, dan Priyayi yang terdapat dalam penelitiannya terkait sosio-kultur keberagaman masyarakat suku Jawa yang dibedakan menjadi tiga golongan (Zaini Muchtarom, 2002: 13).

Bagi masyarakat Indonesia, istilah kiai pada umumnya merupakan julukan untuk seseorang yang dianggap lebih paham tentang keagamaan dibandingkan dengan masyarakat umumnya dengan kata lain kiai merupakan seseorang yang dianggap paling mengerti tentang urusan agama. Menurut M. Kholil Bisri menjelaskan bahwa orang yang pantas dijuluki kiai merupakan seseorang yang oleh masyarakat umum dianggap orang alim (M. Cholil Bisri, 2000: 85). Sedangkan menurut Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa kiai dalam pandangan masyarakat umum merupakan orang yang memiliki kelebihan pada ilmu keagamaan dibanding dengan masyarakat umum lainnya (Nurcholis Madjid, 2002: 96).

Terdapat beberapa pengertian istilah kiai di Indonesia diantaranya yang terdapat di Pulau Jawa yang mana terdapat tiga suku besar yang berada di Pulau Jawa, diantaranya Suku Madura, Suku Jawa, dan Suku Sunda. Istilah kiai digunakan untuk orang-orang yang dianggap ahli agama, alim, dan disegani. Dahulu istilah kiai digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan untuk gelar atau pangkat yang paling tinggi yang diberikan kepada Ambtenaar Bumi Putra, jika di Sumatera pangkat ini setara dengan pangkat Demang. Oleh karena itu terdapat penggunaan istilah kiai kelas I, kelas II, dan terdapat pula istilah asisten kiai yang jika di daerah Sumatera dikenal dengan asisten Demang. Pada umumnya masyarakat Indonesia sering menyebut kiai engan sebutan Ulama (HN Taufiq, 2009:7).

Geertz menyebutkan bahwa kiai merupakan peran kepemimpinan yang efektif dalam hal komunikasi dan menyumbangkan ide terhadap masyarakatnya. Dalam perannya, kiai memiliki keahlian dalam komunikasi perihal agama (keislaman) kepada masyarakat kelas bawah. Salah satu contoh dari adanya perilaku adaptatif oleh kiai yakni adanya pembangunan lembaga pendidikan yang mulai dikembangkan pengaturan berkembangnya dan arahnya. Terdapat kasus lainnya yang dijelaskan oleh Ustadz Mursyid, dalam usahanya membangun lembaga Pendidikan agama di Sokaraja

Purwokerto merupakan pendekatan yang unik. Namun, memang pendekatan semacam ini merupakan pendekatan khas yang dilakukan oleh para kiai dalam usahanya menggerakkan masyarakat (Sayfa Auliya Achidsti, 2014: 161). Pertama, sebagai ahli agama di Sokaraja pada akhir tahun 1920-an, memiliki gelar ahli agama merupakan status sosial yang paling dihormati. Kedua, demi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, kiai dapat meyakinkan dirinya dan segala hal yang dibangunnya. Oleh karena itu, masyarakat setempat memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap kiai. Bahkan masyarakat juga ikut serta dalam menjaga apa yang didirikan oleh seorang kiai.

Dikarenakan kedudukan pada struktur sosial yang berada pada tingkatan elite, kiai menjadi kebutuhan masyarakat disekitar serta menjadi tumpuan bagi aspirasi masyarakat. Maka dari itu, Gerakan kiai tidak jarang dan bahkan harus memiliki sentuhan dengan dunia politik. peran kiai dalam politik sudah terjadi sejak masa awal kerajaan Islam di Nusantara, dimana para tokoh-tokoh agama telah memainkan peran penting. Dalam kasusnya, seorang raja pada jaman dahulu pada proses penobatannya melibatkan para tokoh-tokoh agama yang dijadikan sebagai pelantik atau juga dijadikan sebagai simbolisasi dukungan dari kalangan agama dalam penobatan tersebut. Penguasa yang telah dinobatkan harus berpacu kepada para tokoh-tokoh agama, ahli kitab, dan mistik dikarenakan mereka yang telah menobatkan penguasa tersebut sehingga naik tahta

Seorang kiai umumnya dikenal sebagai pemimpin di agama Islam sebelum akhirnya kiai tersebut terjun ke dunia politik. Pasalnya, agama Islam tidak memahami sekularisasi serta sejarahnya, Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin di agama Islam serta juga sosok pemimpin dalam ranah politik. Maka, istilah kiai politisi hadir dalam membedakan yang mana kiai yang berkecimpung dalam dunia politik dan mana kiai yang hanya fokus untuk mengurus pesantren saja. Dalam dunia

politik, kiai memiliki pengaruh yang kuat yang berasal dari dua sumberdaya yang dijadikan sebagai basis kekuatannya. Pertama, terdapat relasi kekerabatan serta intelektual. Hubungan antar kiai ataupun antara pesantren-pesantren diperkuat oleh genealogi sosial dan genealogi intelektual. Semakin luas relasi kekerabatan dari seorang kiai maka pengaruh ekonomi dan politiknya juga akan semakin kuat. Kedua, kiai yang mendapatkan jabatan formal pada partai politik ataupun organisasi (NU). Jabatan ini adalah dasar dari pengaruh seorang kiai untuk masyarakat lain yang posisinya berada di bawah jabatan kiai tersebut. Sumber kekuasaan itu akan memperkuat sosok kiai dalam pengaruhnya di ranah politik. Secara praktik, sumberdaya ini bermanfaat bagi kelancaran agenda politik elektoral.

Kiai memiliki peran sebagai konsolidator guna memperkuat hubungan politik diantara para kiai, hal ini berguna agar seluruh kelompok mempunyai pandangan dan tujuan yang sama. Konsolidasi juga dilakukan bertujuan menjadi sarana untuk melihat pandangan para kiai dan memastikan agar tidak berbeda pandangan politik. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain berdiskusi, membuat acara keagamaan, serta menjalin komunikasi yang baik. Konsolidator antar kiai ini biasanya dilakukan oleh kiai-kiai yang memiliki pengaruh di kelompok tersebut atau juga memiliki pengalaman politik. Pengaruh kiai sangat ditentukan dengan sumber daya yang memadai (Rizky Amalia Aziz, 2020: 235).

Keberadaan dan peran dari seorang kiai, ustadz, dan tokoh agama lainnya sebagai pejabat baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh para aktivis, pengamat dan praktisi politik di Indonesia. Terdapat banyak opini yang berkembang tentang bagaimana pola kepemimpinan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam mendapatkan dukungan politik. Beberapa dari tokoh agama masih tetap menggunakan cara konvensional maksudnya dengan mengunggulkan kharisma yang dimiliki saat

berkomunikasi kepada public (Syahril dan Mohammad Hidayaturrahman, 2016: 271).

Pada jaman sekarang terlihat partisipasi politik di masyarakat semakin rendah khususnya di Kabupaten Sumenep. Beberapa masyarakat memilih untuk bersikap pesimistis, skeptis, dan bahkan apatis dalam melihat pemilihan di daerahnya. Menurut KPU RI, partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia tidak sesuai harapan. Pasalnya tingkat partisipasi masyarakat pada politik tidak sampai 80% dari target yang ditetapkan KPU RI. Partisipasi pada partai politik maupun kelompok kepentingan memiliki sifat aktif dan pasif, diantaranya: (1) Aktif yang berarti berorientasi dalam proses input dan output. Masyarakat secara aktif mengusulkan kebijakan publik kepada pemerintah, aktif memberikan kritik serta perbaikan untuk menjadi solusi dalam meluruskan kebijakan yang berlaku, aktif ikut serta memilih dalam pemilihan umum yang berlangsung di daerahnya. (2) Pasif yang berarti hanya berfokus pada output saja. Masyarakat yang pasif hanya mengikuti dan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat yang pasif cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain dalam partisipasinya. Orang pasif ini menyerahkan semuanya kepada pemerintah, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diikuti saja (Nur Kholifa Sri W. dan Agus Satmoko Adi, 2017: 381).

Salah satu tokoh agama di Kabupaten Sumenep yang terkenal yaitu KH. A. Busyro Karim yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyyah yang berada di Kabupaten Sumenep. KH. A. Busyro Karim telah menjabat sebagai Bupati di Sumenep selama 2 periode yaitu pada tahun 2010 hingga 2015 lalu 2016 hingga 2021. Hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk mengetahui bagaimana seorang kiai dapat sangat dipercaya untuk memimpin suatu daerah selama 2 periode lamanya. Sebelum menjadi Bupati, KH. A. Busyro Karim pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sumenep. Terlihat bahwa KH.

A. Busyro Karim sudah banyak memiliki pengalaman dalam terjun di dunia politik.

Peneliti fokus dalam meneliti bagaimana pengaruh seorang kiai dalam mendapatkan dukungan pada masyarakat di Sumenep. Hal ini juga melihat KH. A. Busyro Karim merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Karimiyyah yang tentunya telah memiliki kharisma dan sangat menjadi panutan bagi para santrinya. Daerah Madura yang sangat kental dengan Agama Islam tentu menjadi salah satu cara dalam mendapatkan dukungan politik. Orang Madura sendiri memiliki falsafah yang sangat dipegang teguh bagi orang Madura yaitu Bhuppa' Bhabbhu' Ghuru Rato yang maknanya adalah orang Madura harus patuh dan taat kepada ayah dan ibu, patuh kepada figur guru yang biasanya dimaksud dengan kiai, ustadz, atau tokoh agama lainnya, serta patuh kepada Rato yang dimaksud dengan pihak-pihak pemerintah (Triyanto, 2021: 30 Oktober 2022).

Relasi Kuasa Agama dan Politik

Kiai sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk selalu berperan aktif dalam berbagai bidang di dalam masyarakat termasuk juga keaktifan dalam dunia politik. Salah satu tujuan politik adalah sebagai media untuk mengontrol dan mensejahterakan rakyat. Begitu pula seorang kiai, kiai berada di tengah masyarakat memiliki tujuan sebagai pengayom dan memberikan ketenangan batin yang dapat memberikan kebahagiaan. Kesamaan tujuan ini kemudian dapat mengindikasikan bahwa kiai sebagai agen politik. Ia dapat mengatur pola hubungan masyarakat dalam sebuah pemerintahan.

Selain itu politik adalah salah satu media untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik itu pengaruh baik ataupun buruk. Seorang kiai tidaklah cukup hanya melihat tanpa berperan aktif dalam politik. Dengan kemampuannya memahami dan mengontrol masyarakat kiai mampu mendorong terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan keaktifan kiai dalam politik akan mengubah dinamika politik

menjadi lebih bermoral. Sebagai aktor politik, kiai mampu mendorong segala bentuk kebijakan dalam politik disesuaikan dengan norma-norma keagamaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dia akan menjadi pioner perubahan dalam masyarakat yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai Agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kiai tidak akan lagi menjadi pialang budaya akan tetapi dia akan mampu membentuk budaya baru yang dilandaskan pada moralitas keagamaan.

Otoritas seorang kiai memperlihatkan beberapa relasi kuasa baik kepada santri, masyarakat, dan pemerintah yang membantu dalam memenangkan kontestasi politik. Hubungan kuasa tersebut terjalin antara berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan dengan orang yang menjadi obyek kekuasaan. Lahirnya kekuasaan disebabkan adanya keterbelakangan dan kemiskinan. Kekuasaan juga dapat dicirikan dengan keuntungan sepihak, baik untuk diri sendiri, keluarga dekat, maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa selalu mempunyai kemampuan memanipulasi peranan sosial, dan hal yang terpenting dalam suatu masyarakat misalnya antara segelintir orang yang mempunyai modal dengan masyarakat yang butuh modal. Pola ketergantungan yang tidak seimbang tersebut dapat menjadi sikap kepatuhan satu kelompok terhadap kelompok lain (Roderik Martin, 1995: 98). Hal ini menjadikan dialektika pada masa kepemimpinan seorang kiai. KH. Busyro Karim berdasarkan data atas kepemimpinannya terdapat hubungan kuasa yang terbangun untuk memenangkan proses pemilihan bupati pada periode awalnya sebagai berikut:

Relasi kuasa kiai dengan santri

Kepemimpinan merupakan sebuah skill yang berguna dalam mempengaruhi individu maupun kelompok masyarakat dengan tujuan tercapainya suatu tujuan. Sedangkan istilah Kiai sendiri diberikan oleh masyarakat umum terhadap seseorang yang mempunyai keilmuan agama yang mendalam serta

perilaku-perilaku yang mencerminkan keagamaan. KH. Busyro Karim sebagai pemimpin pesantren sekaligus pemimpin kabupaten memiliki otoritas penuh terhadap etiap elemen yang ada di pesantren. Meskipun mempunyai kekuasaan secara penuh atas pesantren, perilaku dari KH. Busyro Karim memperlihatkan sikap seorang tua terhadap anak maupun sikap dari seorang kakak terhadap adiknya. Sungguh sikap melayani kepada santri sangat dilakukan secara ikhlas dan tulus.

Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren tentu memiliki wewenang serta otoritas yang kuat, sebab setiap langlah kebijakan serta keputusan yang ada selalu mengkerucut pada sosok seorang kiai. Kiai sebagai pemimpin pondok pesantren tidak hanya sebatas memimpin para santri, namun juga ikut serta dalam mendidik mengarahkan pesantren kea rah yang lebih baik. Sama halnya dengan pernyataan tersebut, Mujamil Qomar menyatakan bahwa diskursus politik pesantren senantiasa di kuasai dan dikendalikan oleh seorang kiai, maka penggunaan istilah kiai dalam konteks ini mengacu terhadap pengertian lama yaitu seorang kiai sebagai pemimpin pesantren (Mujamil Qomar, 2011: 28). Diantara penyebab yang membentuk kuasa pada seorang kiai yaitu kemumpunian seorang kiai yang menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Peran serta fungsi seorang kiai secara sosiologis sangat menentukan. Kiai mempunyai kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, kiai dengan segala kelebihanannya, dan betapa pun kecil lingkup wilayah pengaruhnya, masih tetap diakui masyarakat sebagai salah satu figur ideal, pandangan yang ideal itu muncul sebab adanya kedudukan structural serta kultural yang tinggi (Karel A. Steenbrink, 1986: 109).

Seorang Kiai secara structural maupun kultural mempunyai kedudukan serta posisi yang sangat strategis. Sehingga dengan demikian membuat perngaruh kiai semakin luas serta semakin membawa pengaruh terhadap kekuasaan kiai. Kiai secara struktural adalah pucuk pimpinan dalam pengelolaan lembaga di pondok pesantren serta masayarakan

secara umum. Sedangkan kiai secara kultural merupakan orang elit yang begitu diperhitungkan suaranya di tengah-tengah sosial masyarakat. Orang-orang pesantren masih mempunyai sebuah keyakinan bahwa seorang kiai sebagai representasi Tuhan di bumi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat, juga sekaligus sebagai harapan dan tumpuan untuk meraih tujuan duni akhirat. Kiai merupakan salah satu bagian dari kekuatan dalam menjalankan kepemimpinan. Kecapan yang ada di dalam diri kiai sebagai pemimpin pesantren. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan bagi seorang pemimpin dalam menangani masalah dengan tujuan mencapai tujuan (Abd. Halim Soebaha ,2013: 7).

Kehidupan pesantren memperlihatkan relasi kiai dengan santri bukan sekedar hubungan guru dengan murid, namun lebih dari itu relasi kiai dan santri adalah hubungan antara guru dan anak, seorang kiai akan selalu memperlakukan santrinya sebagaimana anaknya sendiri. Peran seorang kiai atas santrinya seperti ini tentu menjadikan pengaruh kiai terhadap santrinya sangat kuat, dihormati, serta disegani oleh para santri dan wali santri.

Ketundukan santri terhadap kiai sebagai pancajiwa pesantren membentuk satu hubungan kekuatan kiai terhadap santri dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sehingga proses pendidikan kiai sebagai pempinan pondok pesantren lebih mudah mengarahkan santri sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang telah didesain oleh kiai. Hubungan kiai terhadap santri demikian ini kemudian diistilahkan dengan patron client. Posisi seorang kiai sebagai patron membentuk kekuasaan dalam kepemimpinan seorang kiai, sehingga santri, wali santri, maupun masyarakat, hingga pemerintah setempat menjadi patuh dan tunduk kepada kiai. Ketundukan seorang santri terhadap kainya ini dianggap sudah menjadi kekuatan bagi santri, sebab mampu dalam menjalankan segala peintah terhadap kiai yang dipercaya akan mendatangkan barokah atas ilmu yangh sudah dipelajari dikemudian hari.

hubungan kuasa sendiri mempunyai makna interaksi kuasa berdasarkan kekuatan yang bentuk serta akibatnya ditetapkan oleh perhitungan kekuasaan yang dimiliki anggota maupun kelompok dalam berhubunganya dengan kelompok di luar dirinya. Keterjalinan kuasa kelompok yang mempunyai daya kontrol atau kuasa lebih besar cenderung mempunyai kekuasaan, daya control, dan daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan tetapi ini kekuasaan sifatnya tidak absolut, terutama jika dipandang dari kemampuan suatu kelompok yang tampak lemah yang sebetulnya memiliki nilai tawar (bargaining position) jika mereka mempunyai kemampuan dalam mengajukan modal-modal yang mereka kuasai (Muji Sutrisno, Hendar Putranto, 2005: 146).

Relasi kuasa kiai dengan masyarakat

KH. Busyro Karim mengawali perjuangannya dengan mengabdikan di pondok pesantren langitan dan berdakwah menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Dengan retorika dan bahasa yang santun keberadaan KH. Busyro Karim semakin diterima oleh masyarakat sehingga sering sekali diundang untuk memberikan pengajian yang diadakan masyarakat.

Kiai dalam kehidupan masyarakat memiliki posisi penting pada stratifikasi sosial. Menurut Dhofier dalam Babun Kepemimpinan kiai di masyarakat mengakar pada kultural. Kiai merupakan golongan elite secara kultural, ekonomi, sosial, maupun politik. Kiai adalah pengajar agama yang kebanyakan memiliki tanah yang luas (Babun Suharto, 2011: 86). Dari peran yang dilakukan kiai di tengah masyarakat menjadikan posisinya dipandang penting daripada tokoh yang lain. Segala kegiatan masyarakat selalu melibatkan kiai untuk mengisi acara. Namun acapkali permasalahan yang terjadi di masyarakat seringkali meminta solusi kepada kiai. Dengan demikian kiai dapat dipandang sebagai multitalend.

Masyarakat Madura mempunyai tradisi masih didominasi carapandang Islam tradisional yang sangat taat atas fatwa

seorang kiai yang dikemas dalam nilai sami'na wa atha'na. khususnya dalam hal ini yaitu masyarakat Sumenep juga masih mempertahankan sikap patuh dan tunduk terhadap kiai, sebab kiai bagi masyarakat Sumenep dianggap representasi dari Tuhan. Selain itu bagi masyarakat Sumenep sosok seorang kiai merupakan seseorang yang dari sisi pendidikan keagamaan sangat mempunyai dibandingkan kelas masyarakat lain. Jelaslah, KH. Busyro Karim dalam hal ini memiliki modal pendidikan keagamaan yang kuat dalam hal menguapayakan keterpilihan sebagai bupati.

Relasi kiai dengan pemerintah

Pemerintah yang mempunyai kekuasaan tentu keberadaannya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan khususnya di pondok pesantren. Meskipun pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang mandiri serta secara pengelolaan lepas dari campur tangan pemerintah, bukan berarti pondok pesantren sama sekali tidak membutuhkan pemerintah. Sebagai catatan terlalu kuatnya dominasi hegemoni pemerintah atas masyarakat sipil merupakan gambaran bahwa pemerintah memiliki andil penuh atas setiap kebijakan yang diputuskan kepada masyarakat.. Hegemoni serta dominasi tersebut tidak hanya sekedar masuk dalam realitas sosial, namun melebar pada tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari. Fenomena tersebut memiliki dampak atas terhambatnya upaya penguatan individu atas hak bersuara serta kurang kondusifnya upaya untuk menjalankan demokrasi secara sehat (Laode Ida, 2004: 188).

Hegemoni serta dominasi kekuasaan pemerintah tersebut berdampak terhadap masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pondok pesantren. Sebelum munculnya era reformasi, pondok pesantren selalu hidup dalam bayang ketakutan-ketakutan terhadap kekuasaan negara, sebab sejumlah kebijakan yang diputuskan telah membatasi ruang gerak pondok pesantren. realitas seperti ini sudah menjadi dampak dari lumpuhnya kreativitas anak bangsa termasuk pesantren.

bertahun-tahun lamanya pondok pesantren telah berdiri dan berjalan secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah, bahkan dengan keterbatasan tersebut pondok pesantren mampu bergerak dengan pemikiran untuk memajukan kiprahnya dalam mengembangkan pendidikan Islam serta mengabdikan pada negara.

KH. Busyro Karim tercatat sebelum maju untuk menjadi Bupati, telah menjadi ketua DPRD setempat, Busyro Karim sering menemukan masalah di masyarakat sebab ada banyak kepentingan saat rapat berlangsung di DPRD. Kiai Busyro Kaim mempunyai kelihaian dari petahana dalam memimpin rapat DPRD sudah menjadi hal yang mudah diselesaikan, serta tidak ada lagi perdebatan panjang ke depannya dengan mengedepankan cara demokratis serta diplomatik, namun juga sedikit represif untuk menghindari kealotan dan kelambanan dalam membahas persoalan rakyat, apa lagi yang insidentil.

Relasi kuasa dengan petahana

Kepemimpinan KH. Busyro Karim periode pertama menjabat sebagai Bupati membuat sebuah terobosan dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Kiai Busyro Karim sebagai petahana sudah dianggap sebagai kader terbaik di Sumenep. Kiai Busyro Karim memiliki level kematangan dalam menjalankan demokrasi serta managerial kepemimpinan yang baik dari pihak petahana. Jelas bahwa track record kiai Busyro Karim, mampu memikat generasi muda untuk memilihnya kembali sebagai Bupati Sumenep, sebab selain beliau sebagai pemimpin pondok pesantren juga seorang cendekiawan yang berpendidikan. Maknanya masyarakat Sumenep tidak semuanya bertipologi tradisional. Banyak juga dari kalangan mud acara berfikirnya rasional ketika melihat kepemimpinan seorang petahana. Hal itu kemudian menjadipertimbangan sebagai alasan kenapa memilih kembali kiai Busyro Karim di Pemilihan Bupati Sumenep periode selanjutnya.

Fokus selanjutnya dari hubungan antara kuasa petahana yaitu pada keberlanjutan kuasa dalam konteks membangun

jejaring dengan dunia luar yang normalnya harus terlibat dalam proses-proses adaptasi dan negosiasi. Sehingga proses selanjutnya yaitu menggiring masyarakat Sumenep untuk melangsungkan tindakan penafsiran ulang atas modal sosial yang dimiliki (Fawaizul Umam, 2006: 5). Untuk itulah dari pihak petahana mempunyai keyakinan akan menang dengan hanya bermodalkan mengedepankan relasi kuasa ke-kiai-an. Lebih dari hal itu, track record menjadi pertimbangan banyak orang untuk memilih petahana kembali. Selain karena sudah banyak menuai prestasi, petahana mempunyai kredibilitas yang tinggi atas kepemimpinan petahana sebagai Bupati Sumenep. Tentu berdasarkan capaian prestasi yang telah diperoleh, terutama dalam hal memajukan daerah melalui pembangunan daerah serta pelayanan di ruang public bagi masyarakat yang kian membaik (Wawancara dengan KH Busyro Karim, pada 23 Oktober 2022).

Sosok kiai bagi seorang santri serta kelompok petahana adalah actor pemecah masalah di masyarakat, maknanya adalah seorang petahana memanfaatkan posisi kedekatan dengan kiai untuk meraup suara. Kelompok petahana dalam pemilu selanjutnya tentu telah mendapat dukungan penuh dari berbagai sektor yaitu santri, kiai, maupun struktur pemerintahan yang mempunyai jaringan atas bupati sebelumnya. Oleh sebab itu sinergisitas dalam konteks masyarakat Sumenep yang tradisional, Imam Hasyim sebagai juru kampanye petahana menyatakan juga yang sekaligus tokoh kiai di daerah Sumenep membenarkan bahwa pertimbangan dukungannya di antaranya juga sebab berdasarkan ke-kiai-an petahana. Sosok kiai di Sumenep tentu masih menjadi kunci utama dalam memenangkan pemilu. Sebab setidaknya kebijakan-kebijakan kerjanya akan senada dengan nilai-nilai lokal keislaman. Hal tersebut tentu menjadi bidikan atas dasar kekiaan menjadi faktor sangat menentukan memilih memilih kembali petahana di Pilbup Sumenep 2015 (Wawancara dengan KH Busyro Karim, pada 23 Oktober 2022).

Menjadi seorang kiai di Madura tentu bukan perkara mudah, apalagi menjadi kiai yang terkenal ke seluruh wilayah Madura. Kiai Sumenep memiliki karakteristik di mana kebanyakan yaitu terdiri atas bagian keturunan dan tingkat keilmuan. KH. Busyro Karim merupakan generasi terbaik pada keluarga Kariman. Busyro Karim sebagai putra dari KH. Abdurrahman Karim meneruskan estafet kiai dan pengasuh pondok pesantren di yayasan Al-Karimiyah Beraji Sumenep. Gelar yang diberikan kepada seorang kiai tentu atas dasar kapasitas petahana yang juga merangkap sebagai 'alim ilmu atau ahli agama. Demikian yang terjadi di Sumenep. Tujuannya untuk mengamankan kekuasaan dengan menggunakan jejaring kuasa yang dimiliki khususnya dalam memaksimalkan lembaga-lembaga tertentu, baik lembaga agama, pemerintahan, maupun kemasyarakatan. KH. Busyro Karim terlihat mahir ketika menunjukkan kepiawaiannya dengan sering memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Pertama posisi sebagai penceramah, sangat intens ketika menerima undangan ceramah dari masyarakat untuk dakwah di beberapa wilayah di Madura khususnya di kota Sumenep, terutama saat menjelang Pemilihan Bupati Sumenep. Kedua sebagai bupati di periode 2010-2015 posisi petahana juga sering menjalankan kunjunga ke berbagai tempat wilayah serta ke daerah kepulauan sekitar Sumenep. Adanya agenda Bupati yang ditujukan dengan beberapa tujuan menjadikan petahana dapat terpilih kembali sebagai Bupati Sumenep periode kedua. Hal tersebut dapat terjadi, apabila stimulus-stimulus atau kebijakan yang dijalankan sesuai dengan keinginan yang diberikan kepada masyarakat lancar. Inilah kemudian bagaimana struktur terbentuk dan arena memberikan banyak peluang bagi petahana suatu keserasian dan kesepakatan.

Sebagai sosok bupati yang cerdas dan mempunyai insting, Kiai Busyro Karim jauh-jauh hari sebelum diadakannya pemilu Bupati Sumenep pada 2015, selalu menyampaikan pesan-pesan tersirat kepada setiap kepala desa supaya sejalan dan searah menggiring opini masyarakat untuk kesuksesan kembali

pencalonan dirinya menjadi kembali sebagai petahana untuk menjadi Bupati. Hingga jauh sebelum datangnya pemilu, foto-foto di beberapa wilayah di Sumenep hingga menjangkau di desa-desa pelosok terpampang foto dirinya dengan kepala desa setempat. Baliho besar terpasang di setiap desa-desa di Sumenep dengan jargonnya yaitu Super Mantap dan sepenggal kata Lanjutkan!!!. Realitas tersebut jelas memperlihatkan sebuah simbol yang mencoba dikukuhkan supaya banyak kepala desa memberikan contoh supaya mendukung dan memilih kembali kiai Busyro Karim sebagai Bupati terpilih kembali pada Pemilu Bupati Sumenep 2015. Antusiasme masyarakat tentu cukup tinggi. Meski demikian, ada beberapadesa di Sumenep yang enggan memasang foto maupun baliho kiai Busyro Karim sebab mereka menginginkan sikap netral dari percaturan politik.

Patronase Klien ala Busyro Karim

Alam proses kemenangan Pilkada di kabupaten Sumenep, terdapat hubungan patron klien yang terjadi pada proses pemilihan KH. Busyro Karim. Sebelum pembahasan lebih dalam, penulis akan memaparkan kembali terkait bentuk-bentuk hubungan patronase antara lain seperti Homogenitas, Kesenambungan, Dominasi Patron, Klien Potensial, Keseimbangan. dijelaskan dalam teori patronase bahwa hubungan antara patron sebagai mereka yang memiliki modal, sedangkan klien merupakan mereka yang hanya menjadi pekerja. Untuk mendukung pemikiran patronasinya, Aspinall juga memberikan pikiran terkait dengan konsep hubungan antara patron-klien, antara lain:

1. Setiap mereka, patron-klien tidak memiliki sumber kekuasaan yang sama dan tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sumber kekayaan yang dimiliki oleh patron merupakan sumber kekayaan yang lebih ketimbang milik klien.
2. Hubungan yang bersifat personal merupakan sifat hubungan yang dimiliki oleh keduanya. Hubungan yang mereka

ciptakan ini setidaknya tidak sampai menarik orang lain untuk bergantung dengan hubungan patron-klien.

3. Keputusan yang diambil harus menimbang antara keuntungan dan timbal balik yang didapatkan untuk kedua belah pihak. Keputusan ini biasanya selalu mengikutsertakan semua aspek pendukung di dalamnya.

Selain itu, Adapun ciri-ciri dari hubungan patron-klien yang dikemas oleh Aspinal dalam teori patronase, yakni:

1. Adanya interaksi tatap muka antar pelaku sebagai pendukung komunikasi dua arah demi mencapai kesepakatan yang akan di bawa. Karena, kesepakatan ini menyangkut dengan keinginan kedua belah pihak.
2. Dalam proses hubungan patron-klien ini terdapat proses pertukaran barang dan jasa yang berlangsung diantara keduanya. Barang dan jasa ini memang tidak memiliki arti yang sama, namun sebagai alat yang akan ditukar, klien sebagai pemilik jasa ini akan menukarkan dengan barang yang diberikan oleh patron demi keuntungan yang didapat oleh keduanya.

Aspinal juga memberikan lima model hubungan patronase, yakni patronase politik dengan dominasi patron, patronase berbasis klien potensial, keseimbangan antara patron dan klien, daya tahan dan homogenitas. Pada fenomena pemenangan Pilkada di Kabupaten Sumenep ini memiliki beberapa variasi dan pandangan terkait dengan hubungan antara Kiai dan Santri maupun Masyarakat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pondok pesantren menjadi tempat yang mana masih kental dengan hubungan patron-klien yang dibawa oleh kiai dan juga para santri.

Kiai memiliki kekuatan dan kekuasaan di dalam pesantren yang menjadikan hubungan antara kiai dan santri dapat dikatakan sebagai hubungan patron-klien. Ketundukan dari para santri kepada sang kiai ini menjadikan langgengnya hubungan patron-klien di dalam pesantren. Dengan mengambil

konsep *sami'na waa atho'na* mengartikan bahwa dengan kepatuhan akan membawa santri lebih menjadi pribadi yang baik dan tidak kwalat. Adanya hubungan patron klien di dalam pesantren ini banyak dimanfaatkan khususnya di dunia politik dan pemerintahan. Biasanya, hubungan patron klien di dalam pesantren ini membawa keuntungan bagi siapa saja yang memiliki relasi baik dengan pesantren maupun Kiai sebagai sang patron.

Dalam fenomena kemenangan Pilkada di kabupaten Sumenep ini juga demikian, KH. Busyro Karim di DPRD saat pilkada yang pertama dan saat menjadi petahana di pilkada yang kedua. Hal ini dimanfaatkan oleh KH. Busyro Karim yakni memanfaatkan hubungan patron klien di dalam pesantren yang digunakan sebagaimana fungsi partai politik yakni mencari dukungan dan melebarkan jaringan relasi. KH. Busyro Karim dalam hal ini berkedudukan sebagai patron yang memiliki sumber kekuasaan dan kekayaan yang cukup banyak dan lebih dari kiai pesantren. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aspinal dalam pemikirannya mengatakan bahwa patron merupakan dia yang memiliki sumber kekuasaan dan kekayaan yang besar dan memiliki sifat sebagai pelindung.

Ciri-ciri yang muncul dalam hubungan ini sama halnya dengan yang diungkap oleh Aspinal pada jurnal kepenulisannya, yakni adanya interaksi tatap muka berupa kegiatan *sowan* kiai dan *sowan* pesantren yang dilakukan oleh Busyro Karim. Kedua, adanya proses pertukaran material yang dibawa oleh masing-masing patron dan klien yang sesuai dengan sumber kekayaan dan kekuatan. Busyro Karim sebagaimana menjadi patron memiliki basis material yang terdapat di pemerintahan legislatif yakni dalam pembuatan kebijakan publik sebagai salah satu bentuk jaminan keamanan dan kesejahteraan. Kiai sebagai klien juga memiliki basis material yang berasal dari hubungan patronase di dalam pesantren dengan para santri yang nantinya dapat menjadi sebuah paksaan bagi setiap komponen yang ada di pesantren untuk mendukung sang patron.

Namun, pada dasarnya, keikutsertaan kiai ini dapat dilihat sebagai klien. Dari hubungan patron-klien diatas, keuntungan yang diambil dari Busyro Karim sebagai patron ialah partai Busyro Karim mendapatkan dukungan dan juga basis massa yang berasal dari pesantren yang diambil dari hubungan patron-klien antara kiai dan santri yang telah dibangun di dalam pesantren. Kiai sebagai klien juga mendapatkan keuntungan dari adanya hubungan patron-klien dengan Busyro Karim. Kiai sebagai pengasuh pesantren mendapatkan keamanan dan jaminan kesejahteraan bagi pesantren dan komponen-komponen di dalamnya.

Dari fenomena diatas, relevan dengan variasi hubungan patron-klien dari pemikiran Aspinal, yakni variasi dengan dominasi sumber daya patron. Adanya sumber daya yang dimiliki oleh Busyro Karim sebagai patron ini menjadikan patron dapat masuk dan keberbagai cluster yang dimiliki oleh klien. Aspinal juga mengatakan bahwa patron dalam varian ini tetap memiliki hak sebagai pengendali kepemilikannya sendiri seperti halnya kekayaan, hingga kewenangan di lingkup publik. iai sebagai klien dalam hal ini dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki di dalam pesantren dapat menjadikan kekuatan dan kepatuhan dari para santri atas keinginan dan kepentingan yang dibawa oleh Kiai sebagai klien. Bantuan material yang diberikan oleh klien kepada patron salah satunya ialah bentuk dukungan dan basis massa yang dapat diberikan untuk patron. Selain adanya hubungan patronase di dalam proses pemenangan Pilkada, adanya praktik politik pork barrel (politik gentong babi) yang diakibatkan oleh adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang secara tidak langsung memberikan ruang yang sangat optimal. Pembuatan kebijakan publik daerah akan diarahkan untuk memenuhi kepentingan dari pertahana dalam menjalankan politik elektoral di masyarakat. Jelasnya, adanya dana APBD yang menjadi sumber anggaran untuk pesantren ini banyak memberikan peluang untuk disalahgunakan jika tidak adanya transparansi data yang diberikan kepada masyarakat.

Kesimpulan

Kiai sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk selalu berperan aktif dalam berbagai bidang di dalam masyarakat termasuk juga keaktifan dalam dunia politik. Salah satu tujuan politik adalah sebagai media untuk mengontrol dan mensejahterakan rakyat. Begitu pula seorang kiai, kiai berada di tengah masyarakat memiliki tujuan sebagai pengayom dan memberikan ketenangan batin yang dapat memberikan kebahagiaan. Kesamaan tujuan ini kemudian dapat mengindikasikan bahwa kiai sebagai agen politik. Ia dapat mengatur pola hubungan masyarakat dalam sebuah pemerintahan. Kepemimpinan kiai memunculkan beberapa relasi kuasa baik terhadap santri, masyarakat, dan pemerintahan yang membantu dalam memenangkan kontestasi politik. Hubungan kekuasaan menimbulkan antara berbagai pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan.

Kiai memiliki kekuatan dan kekuasaan di dalam pesantren yang menjadikan hubungan antara kiai dan santri dapat dikatakan sebagai hubungan patron-klien. Ketundukan dari para santri kepada sang kiai ini menjadikan langgengnya hubungan patron-klien di dalam pesantren. Dengan mengambil konsep *sami'na waa atho'na* mengartikan bahwa dengan kepatuhan akan membawa santri lebih menjadi pribadi yang baik dan tidak kwalat. Adanya hubungan patron klien di dalam pesantren ini banyak dimanfaatkan khususnya di dunia politik dan pemerintahan. Biasanya, hubungan patron klien di dalam pesantren ini membawa keuntungan bagi siapa saja yang memiliki relasi baik dengan pesantren maupun Kiai sebagai sang patron.

Dalam fenomena kemenangan Pilkada di kabupaten Sumenep ini juga demikian, KH. Busyro Karim di DPRD saat pilkada yang pertama dan saat menjadi petahana di pilkada yang kedua. Hal ini dimanfaatkan oleh KH. Busyro Karim yakni memanfaatkan hubungan patron klien di dalam pesantren yang

digunakan sebagaimana fungsi partai politik yakni mencari dukungan dan melebarkan jaringan relasi. KH. Busyro Karim dalam hal ini berkedudukan sebagai patron yang memiliki sumber kekuasaan dan kekayaan yang cukup banyak dan lebih dari kiai pesantren. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aspinal dalam pemikirannya mengatakan bahwa patron merupakan dia yang memiliki sumber kekuasaan dan kekayaan yang besar dan memiliki sifat sebagai pelindung.

Daftar Rujukan

- Achidsti, Sayfa Auliya. 2014. Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol. 12, No. 2.
- Aziz, Rizky Amalia, 2020, Kiai dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlorin dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo, Jurnal PolGov, Vol. 2, No. 2.
- Bisri, M. Cholil, Ketika Nurani Bicara, Bandung: Remaja Rosda. 2000.
- HN Taufiq. 2009. Kepemimpinan Kiai, Studi Pengembangan Kelembagaan di Pondok Modern Gontor. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ida, Laode, NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: Erlangga, 2004.
- Madjid, Nurcholis, Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Martin, Roderik, Sosiologi Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Muchtarom, Zaini. Islam Di Jawa, Dalam Perspektif Santri & Abangan. (akarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Prastiwi, Merlia Indah, "Politisasi Pesantren dan Pergeseran Fungsi Pesantren di Madura", KARSA' Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 23, No. 2, (Desember 2015).

- Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Ransformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soebahar, Abd. Halim, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Sri W, Nur Kholifa. dan Agus Satmoko Adi, 2017, *Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Kota dan Desa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2015 di Sumenep*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Vol. 5, No. 1.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Subiyanto, Rudi, “Keterlibatan Kiai Dalam Pilkada: Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjar Negara Tahun 2006”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Suharto, Babun, *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Sutrisno, Muji, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Syahril dan Mohammad Hidayaturrahman, 2016, *Strategi Pencitraan Calon Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim Periode 2010-2015*, Sumenep: Universitas Wiraraja.
- Triyanto, 2021, *Mengenal Falsafah Madura Bhuppa’ Bhabbhu’ Ghuru Rato*, diakses pada 30 Oktober 2022, <https://www.pulaumadura.com/2021/02/mengenal>
- Umam, Fawaizul, dkk., *Membangun Resistensi Merawat Tradisi Modal Sosial Komunitas Wetu Telu*, Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat, 2006.